

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS-FSVA*) KABUPATEN SEKADAU



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2021

SAMBUTAN BUPATI SEKADAU

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan karunnia-Nya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau telah menyelesaikan penyusunan buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Sekadau Tahun 2021. Peta FSVA ini dibuat untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan sampai pada tingkat Desa.

Pangan adalah hal penting merupakan kebutuhan hak dasar manusia, mengingat sangat pentingnya masalah pangan mendorong setiap negara melakukan berbagai upaya dalam rangka berusaha mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sehingga mampu dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai pada tingkat perseorangan, begitu pula dengan pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Sekadau dalam program kerja pemerintahan saat ini juga melalui Program IP3K (Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk Kesejahteraan Rakyat) sangat mengutamakan segala upaya untuk membangun dan mengembangkan program/kegiatan di bidang pangan demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Sesuai amanah Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, tersedia cukup baik jumlah maupun mutu (aman, beragam dan bergizi seimbang) yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Sekadau dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan saat ini yaitu bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang menyebabkan kebutuhan pangan juga bertambah. Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini bisa menjadi panduan dalam memberikan referensi kebijakan serta arah pembangunan di daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka mengatasi permasalahan kerentanan pangan dan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau beberapa tahun terakhir terindikasi dengan berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan prioritas 1 (sangat rentan) dari 3 (tiga) Desa menjadi 0 (nol) Desa

atau tidak terdapat desa yang sangat rentan pangan pada Tahun 2021, dan menurunnya jumlah desa yang masuk dalam kategori prioritas 2 (rentan) dan prioritas 3 (cukup rentan). Meskipun demikian pembangunan sistem pembangunan ketahanan pangan daerah Kabupaten Sekadau masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk ketahanan pangan daerah tetapi juga menjadi daerah mandiri pangan. Semua ini terwujud tidak hanya dari peran pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat, sehingga kedepan saya berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat bekerjasama secara aktif dalam menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Sekadau.

Sebagai penutup perkenankan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sekadau tahun 2021, mari bersama kita membangun ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau, karena dengan ketahanan pangan kita akan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu membangun daerah ini menjadi Kabupaten yang berkembang dan maju.

Sekadau, Oktober 2021

BUPATI SEKADAU


ARON, SH.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan rahmatNya Buku peta ketahanan dan kerentana pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Sekadau Tahun 2021 ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku Peta FSVA ini dibuat untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan sampai pada tingkat Desa.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau beberapa tahun terakhir terindikasi dengan berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan prioritas 1 (sangat rentan) dari 3 (tiga) Desa menjadi 0 (nol) Desa atau tidak terdapat desa yang sangat rentan pangan pada Tahun 2021. Meskipun demikian pembangunan sistem pembangunan ketahanan pangan daerah Kabupaten Sekadau masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk ketahanan pangan daerah tetapi juga menjadi daerah mandiri pangan. Semua ini terwujud tidak hanya dari peran pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat, sehingga kedepan saya berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat bekerjasama secara aktif dalam menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Sekadau.

Dengan tersusunnya buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam memberikan referensi kebijakan serta arah pembangunan di daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka mengatasi permasalahan kerentanan pangan dan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga penyusunan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sekadau ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, mari bersama kita membangun ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau untuk menuju Kabupaten Sekadau yang tahan pangan dan mandiri pangan menuju Kabupaten berkembang dan maju.

Sekadau, Oktober 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEKADAU



Drs. SANDAE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199401 1 001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
- 1.3. Metodologi

2 KETERSEDIAAN PANGAN

- 2.1. Lahan Pertanian
- 2.2. Produksi Pangan
- 2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

3 AKSES PANGAN

- 3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga
- 3.2. Akses Penghubung
- 3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan

4 PEMANFAATAN PANGAN

- 4.1. Akses Air Bersih
- 4.2. Akses Tenaga Kesehatan
- 4.3. Dampak (outcome) Dari Status Kesehatan
- 4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

- 5.1. Kondisi Ketahanan Pangan
- 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam **UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi** yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. **Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*)** merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. **FSVA Kabupaten** merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari **tiga aspek ketahanan pangan** yaitu : **ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan**. Pemilihan indikator didasarkan pada: **(i)** keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan **(ii)** tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan **(iii)** ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten. Indikator pada **aspek ketersediaan pangan** adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. **Indikator** pada **aspek akses pangan** adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada **aspek pemanfaatan pangan** adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di **Prioritas 1, 2 dan 3** merupakan **wilayah rentan pangan** dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di **Prioritas 4, 5, dan 6** merupakan **wilayah tahan pangan** dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2020 menunjukkan bahwa di Kabupaten Sekadau tidak ada desa yang masuk dalam **desa sangat rentan** (prioritas 1), dan **desa rentan pangan** (Prioritas 2-3) sebanyak **35 desa** dari 87 desa (**40,23%**), yang terdiri dari **16 desa (18,39%)** merupakan **desa rentan pangan Prioritas 2**; **19 desa (21,84%)** **desa cukup rentan Prioritas 3**. Desa yang masuk prioritas 2 (rentan pangan) tersebar di Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 8 desa ; Kecamatan Belitang Hulu sebanyak 3 desa ; Kecamatan Nanga Taman sebanyak 2 desa, Kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 2 Desa ; dan Kecamatan Belitang sebanyak 1 Desa. Desa yang masuk prioritas 3 (cukup rentan) tersebar di Kecamatan Belitang Hulu sebanyak 6 desa ; Kecamatan Nanga Taman sebanyak 4 desa ; Kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 4 desa, ; Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 2 desa ; dan Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 1 Desa.
7. **Karakteristik Desa Rentan Pangan** berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ditandai dengan **(1)** rendahnya rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah (Ketersediaan Pangan), **(2)** rendahnya rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, **(3)** tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan Saran, **(4)** banyaknya jumlah Desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, **(5)** tingginya Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, dan **(6)** tingginya Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan :
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Pembukaan lahan pertanian potensial baru
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sekadau terdiri dari 7 kecamatan dan 78 desa dengan total penduduk tahun 2020 sebesar 211.559 jiwa (BPS). Secara geografis memanjang dari utara ke selatan di antara 111° 17'44" Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 00° 38' 23" Lintang Utara sampai 00° 44' 25" Lintang Selatan. Kabupaten Sekadau di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah daratan seluas 6236 km². Kecamatan terbesar luasnya adalah Kecamatan Nanga Mahap dengan luas 1.205,16 Km² atau 19,24% dari luas Kabupaten Sekadau, sedangkan Kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Belitang sebesar 336,79 Km² atau sekitar 5,37% dari luas Kabupaten Sekadau.

Secara klimatologis, Kabupaten Sekadau merupakan daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Perekonomian Kabupaten Sekadau tergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini trennya angkanya naik dari tahun 2016-2020, peranannya naik dari 37,98% di tahun 2016 menjadi 38,06% di tahun 2017, dan turun jadi 38% di tahun 2018, dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 37,58% (angka sementara) dan kembali naik tahun 2020 sebesar 39,7% (angka sangat sementara). Kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor mengalami kenaikan peranan. Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, penyumbang PDRB terbesar kedua yaitu pedagang besar dan eceran, selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019. Dan mulai tahun 2019 FSVA Kabupaten sudah disusun setiap tahun.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2.KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

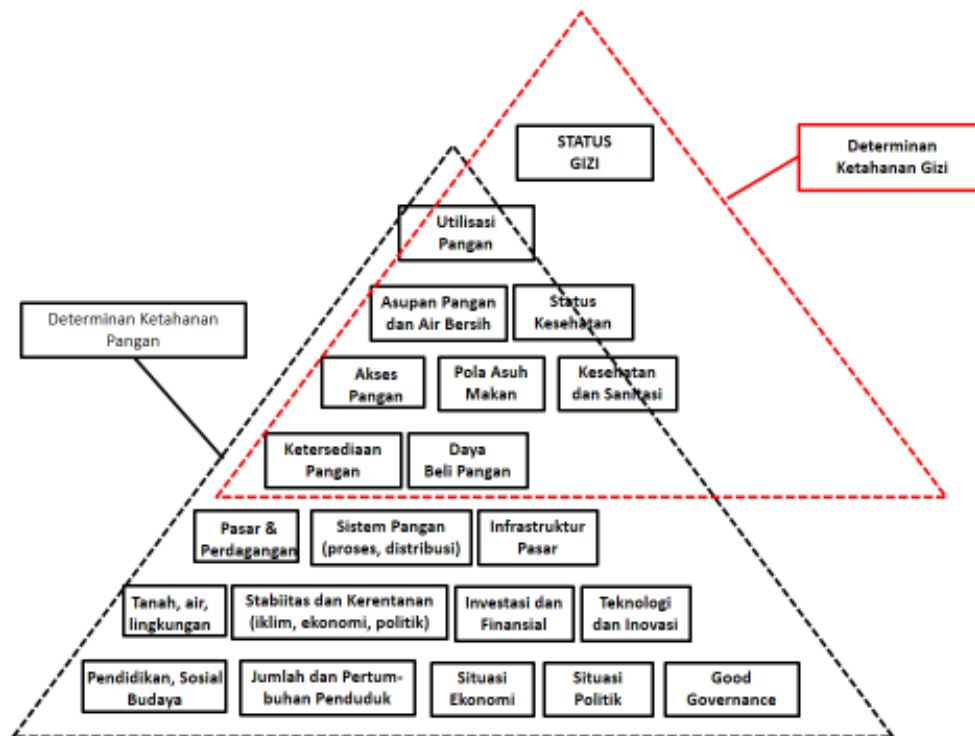
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas

hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan

khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Indikator Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2019

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas baku lahan sawah dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none">• DKP3 Kab. Sekadau 2020• Disdukcapil Kabupaten Sekadau 2020
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	<ul style="list-style-type: none">• BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2020)• Disdukcapil Kab. Sekadau 2020
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none">• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2020• Dinas Sosial, P3A Kab. Sekadau 2020• Disdukcapil Kab. Sekadau 2020
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	<ul style="list-style-type: none">• BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2020)

Indikator	Definisi	Sumber Data
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2020) • Disdukcapil Kab. Sekadau 2020
Rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah penduduk pertenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan kepatan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan, P2KB Kab. Sekadau • BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2020) • Disdukcapil Kab. Sekadau 2020

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

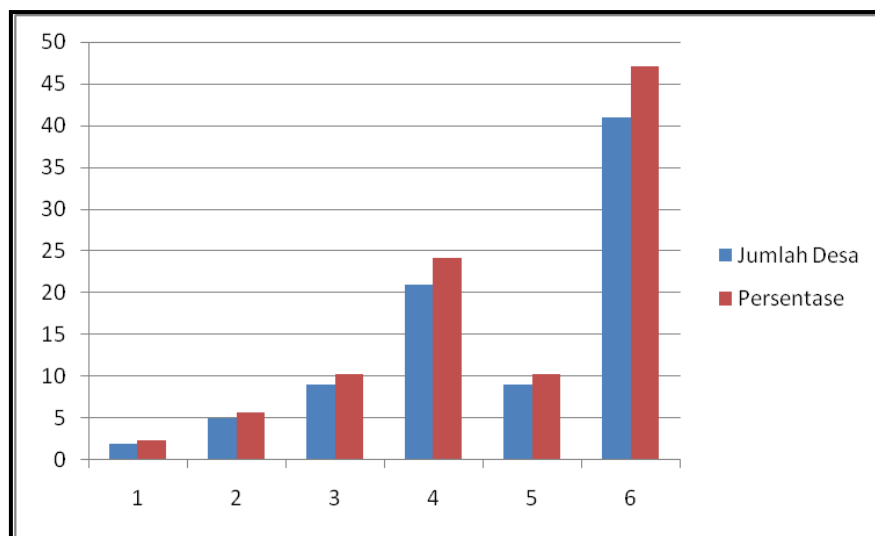
2.1. LAHAN PERTANIAN

Luas lahan pertanian di Kabupaten Sekadau masih belum dapat diketahui jelas datanya secara resmi, sehingga hanya rasio luas baku lahan sawah saja yang ada datanya. Rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah yang merupakan bagian dari lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap jumlah penduduk desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 87 desa di Kabupaten Sekadau, 2 desa masuk dalam prioritas 1 (2,3 %), 5 desa masuk dalam prioritas 2 (5,7 %) dan 9 desa prioritas 3 (10,3 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Belitang Hilir yaitu sebanyak 4 desa.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	2	2,3
2	Rentan	5	5,7
3	Agak Rentan	9	10,3
4	Agak Tahan	21	24,1
5	Tahan	9	10,3
6	Sangat Tahan	41	47,1



Gambar 2.1. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Tabel 2.2 Sebaran Desa di Kecamatan dengan rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	1	-	1	2
2	SEKADAU HULU	-	1	-	1
3	NANGA TAMAN	-	-	2	2
4	NANGA MAHAP	-	1	2	3
5	BELITANG HILIR	1	1	2	4
6	BELITANG	-	1	2	3
7	BELITANG HULU	-	1	-	1

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk yang paling kecil atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 4 desa, disusul Kecamatan Nanga Mahap dan Kecamatan Belitang masing-masing sebanyak 3 desa, Kecamatan Sekadau Hilir dan Kecamatan Naga Taman masing-masing 2 desa, dan Kecamatan Sekadau Hulu dan Kecamatan Belitang Hulu masing-masing 1 desa.

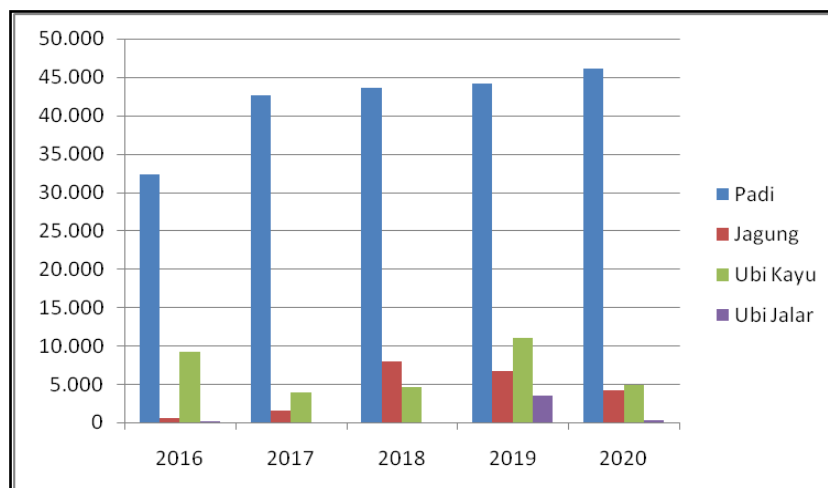
2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 39,7 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi masih merupakan bahan pokok di Kabupaten Sekadau yang menyumbang hampir 78% dari total produksi sereal kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.2. produksi jagung dan umbi-umbian di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan dan juga penurunan sejak tahun 2015. Peningkatan dan penurunan ini terutama disebabkan oleh masyarakat masih belum fokus membudidayakan umbi-umbian karena pemasarannya yang masih belum menjanjikan bagi petani. Meskipun sudah cukup lama pemerintah menggalakkan program konsumsi komoditas sereal lain selain beras dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan terigu, tetapi masih sulit bagi masyarakat beralih dari konsumsi nasi sebagai makanan pokok. Produksi padi meningkat selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 32.303 ton tahun 2016 menjadi 46.152 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.3 Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2016-2020 (Ton)

Sereal	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata 5 tahun
Padi	32.303	42.561	43.612	46.575	46.152	41.745
Jagung	615	1.562	7.870	6.694	4.215	4.191
Ubi Kayu	9.230	3.857	4.578	11.005	4.854	6.705
Ubi Jalar	97	83	21	3.528	290	804

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau, 2021



Gambar 2.2 Produksi Sereal dan umbi-umbian tahun 2016-2020

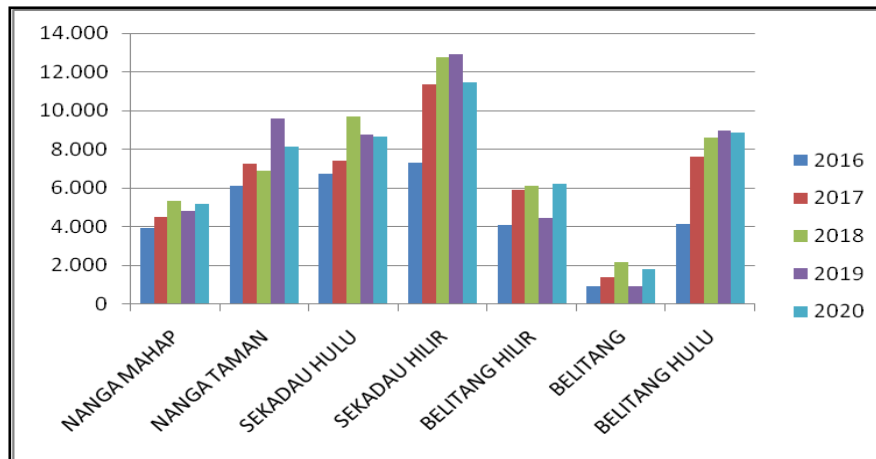
Pada Tabel 2.3 di bawah ini dapat diketahui dari total produksi sereal dapat dilihat laju pertumbuhan produksi tahun 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,33 %. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 51.566 ton dan terkecil pada tahun 2016 yaitu sebesar 33,299 Ton.

Tabel 2.4 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2016-2020)

Kecamatan	Produksi Total Sereal					Laju Pertumbuhan 2016 - 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Nanga Mahap	3.952	4.534	5.335	4804	5.204	7,69
Nanga Taman	6.119	7.263	6.895	9609	8.161	9,48
Sekadau Hulu	6.749	7.423	9.713	8783	8.641	7,41
Sekadau Hilir	7.299	11.350	12.761	12917	11.450	14,45
Belitang Hilir	4.114	5.926	6.106	4480	6.212	14,78
Belitang	936	1.402	2.169	940	1.818	35,32
Belitang Hulu	4.130	7.634	8.587	8976	8.881	25,20
Total	33.299	45.532	51.566	50.509	50.367	16,33

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.

Dapat dilihat dari tabel-tabel di atas dapat diketahui secara umum produksi padi, jagung, umbi-umbian mengalami penurunan khususnya di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari laju pertumbuhan produksi juga kecil dan cenderung lambat, hal ini disebabkan karena banyak peralihan lahan ke perkebunan kelapa sawit. Masyarakat berpandangan bahwa kebun kelapa sawit lebih menjanjikan daripada tanaman pangan dan hortikultura.



Gambar 2.3 Jumlah Produksi Total Serealia per Tahun periode 2016-2020

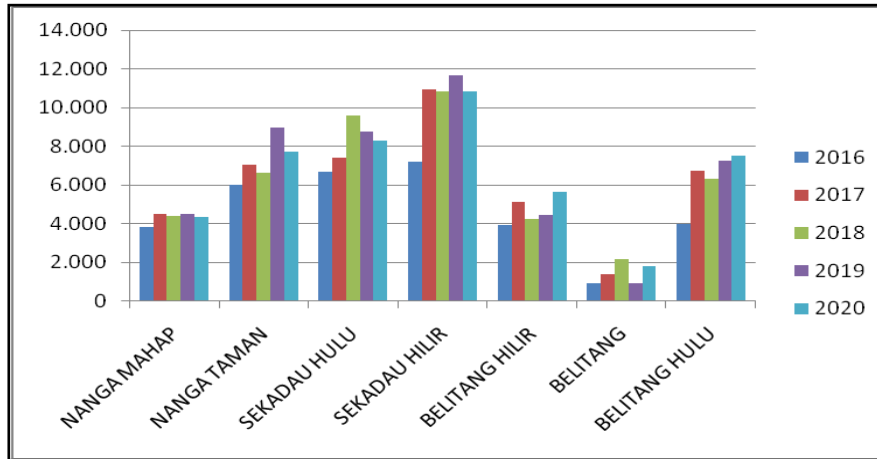
Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Sekadau selama 5 tahun terakhir (2016-2020) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 bervariasi di 7 kecamatan dan berdasarkan angka sementara di tahun 2020 ada penurunan produksi di sebagian Kecamatan. Peningkatan produksi padi tertinggi terjadi di kecamatan Sekadau Hilir sebesar 11.646 ton pada tahun 2019.

Tabel 2.5 Produksi Padi 2016 - 2020 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nanga Mahap	3.840	4.487	4.382	4.531	4.331
2. Nanga Taman	6.040	7.054	6.649	8.958	7.720
3. Sekadau Hulu	6.688	7.397	9.571	8.770	8.294
4. Sekadau Hilir	7.216	10.949	10.838	11.646	10.840
5. Belitang Hilir	3.948	5.138	4.272	4.476	5.637
6. Belitang	936	1.402	2.169	940	1.818
7. Belitang Hulu	4.016	6.725	6.315	7.253	7.512
Jumlah	32.684	43.152	43.196	46.575	46.152

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.4 Produksi Padi Tahun 2016-2020

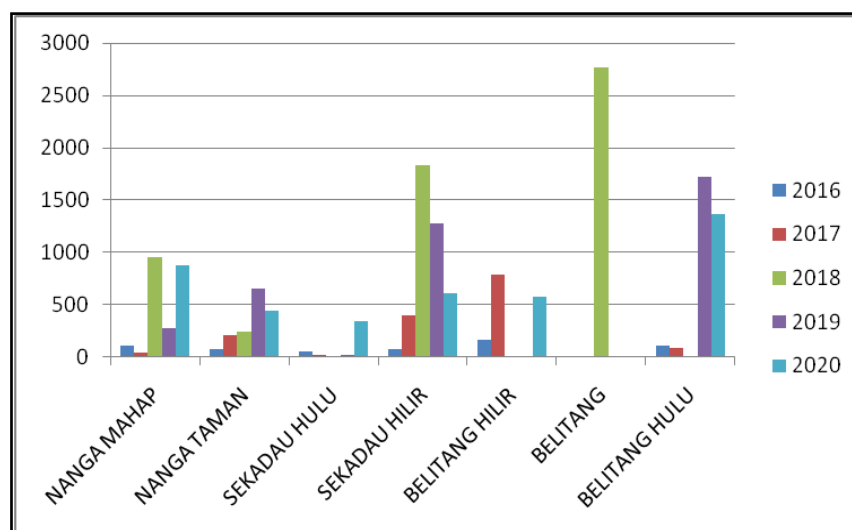
Jagung

Pada tahun 2018, produksi jagung mencapai produksi tertinggi yaitu sebesar 7.870 ton. Jumlah ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya bahkan 2 tahun berikutnya 2019 dan 2020 terjadi penurunan menjadi 3.934 ton dan 4.215 ton. Pada Tahun 2020 kontribusi terbesar produksi jagung terjadi di Kecamatan Belitang Hulu sebesar 1.369 ton, menyusul Kecamatan Nanga Mahap sebesar 873 ton dan terendah Kecamatan Belitang yaitu tidak ada produksi jagung sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Jagung 2016 - 2020 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nanga Mahap	112	47	953	273	873
2. Nanga Taman	79	209	246	651	441
3. Sekadau Hulu	61	26	142	13	347
4. Sekadau Hilir	83	401	1.923	1.271	610
5. Belitang Hilir	166	788	1.834	4	575
6. Belitang	-	-	-	-	-
7. Belitang Hulu	114	90	2.772	1.723	1369
Jumlah	615	1.561	7.870	3.934	4.215

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.5 Produksi Jagung 2016 – 2020 (Ton)

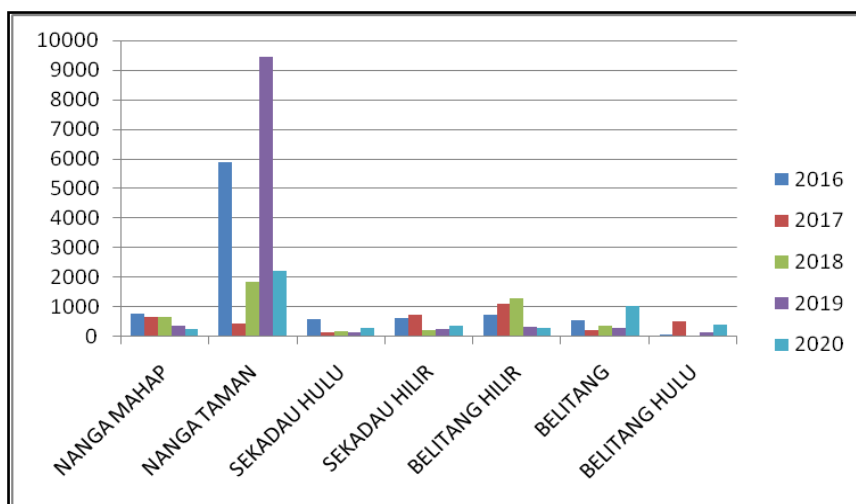
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu di Kabupaten Sekadau mengalami fluktuasi (meningkat/menurun) selama periode 2016-2020. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan produksi dari tahun 2016 dan kembali naik pada tahun 2019, selanjutnya menurun lagi di tahun 2020 ini. Daerah penyumbang produksi terbanyak sepanjang periode 2016-2020 yaitu di Kecamatan Nanga Taman sebesar 9.435 ton di tahun 2019 dan disusul Kecamatan lain. Begitu pula pada tahun 2020 produksi tertinggi di Kecamatan Nanga Taman sebesar 2.238 ton. Data produksi ubi kayu secara seluruhnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Produksi Ubi Kayu 2016 - 2020 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nanga Mahap	774	680	676	387	247
2. Nanga Taman	5.872	445	1.856	9.435	2.238
3. Sekadau Hulu	597	138	177	152	296
4. Sekadau Hilir	639	742	236	270	362
5. Belitang Hilir	727	1.098	1.279	340	280
6. Belitang	551	228	353	281	1.020
7. Belitang Hulu	69	525	-	141	411
Jumlah	9.230	3.857	4.578	11.005	4.854

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.7 Produksi Ubi Kayu 2016 - 2020 (Ton)

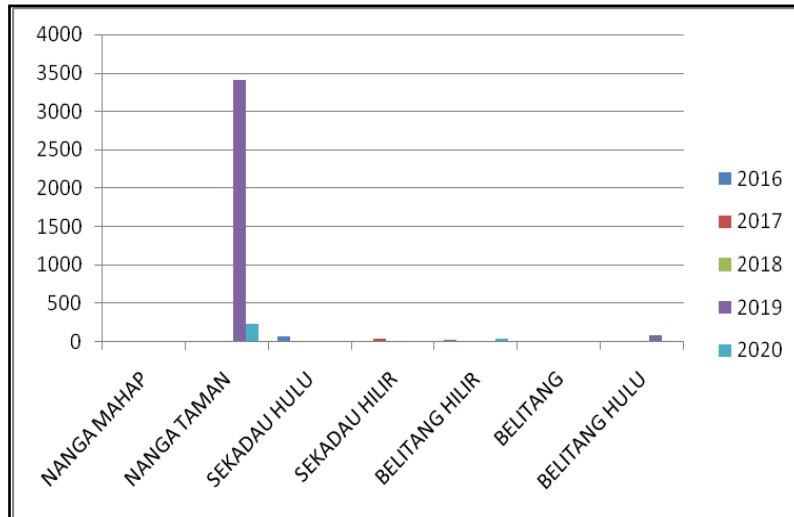
Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.528 ton dan Kecamatan Nanga Taman merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 3.402 ton. Tahun 2020 produksi ubi jalar kembali turun menjadi 290 ton, adapun rincian produksi ubi jalar tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Produksi Ubi Jalar 2016 - 2020 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nanga Mahap	-	-	-	-	-
2. Nanga Taman	-	-	-	3.402	232
3. Sekadau Hulu	75	-	-	-	-
4. Sekadau Hilir	-	42	-	21	19
5. Belitang Hilir	25	21	21	21	39
6. Belitang	-	-	-	-	-
7. Belitang Hulu	-	19	-	84	-
Jumlah	100	82	21	3.528	290

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.8 Produksi Ubi Jalar 2016 - 2020 (Ton)

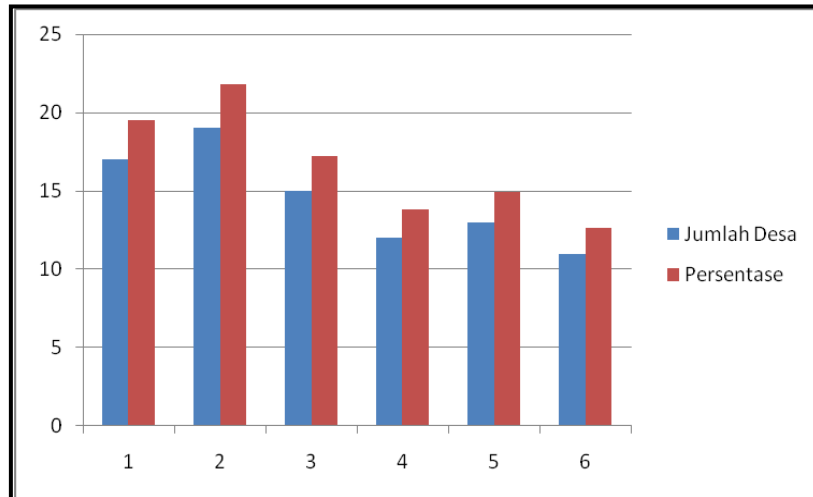
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 87 desa di Kabupaten Sekadau, 17 desa masuk dalam prioritas 1 (19,5 %), 19 desa prioritas 2 (21,8 %) dan 15 desa prioritas 3 (17,2%).

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	17	19,5
2	Rentan	19	21,8
3	Agak Rentan	15	17,2
4	Agak Tahan	12	13,8
5	Tahan	13	14,9
6	Sangat Tahan	11	12,6



Gambar 2.9 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Tabel 2.9 Sebaran Desa di Kecamatan dengan rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	7	3	1	11
2	SEKADAU HULU	2	3	2	7
3	NANGA TAMAN	1	-	2	3
4	NANGA MAHAP	1	5	6	12
5	BELITANG HILIR	3	4	-	7
6	BELITANG	1	2	1	4
7	BELITANG HULU	1	2	3	6

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio sarana prasarana ekonomi yang masih kurang atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Nanga Mahap 12 Desa, disusul Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu dan Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang dan terakhir Nanga Taman.

2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau dari tahun 2010-2020 mencapai 1,49% per tahun, sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 16,33 %. Rata-rata skor individu rasio lahan baku sawah dibandingkan jumlah penduduk desa pada prioritas 1-3 adalah sebesar 12,25%. Rata-rata skor individu rasio sarana ekonomi penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga pada prioritas 1-3 mencapai 10,26%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Merujuk pada Agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sekadau, strategi pokok pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Sekadau khususnya dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan meliputi :

1. Penyediaan data base pangan sebagai acuan pengambilan kebijakan dan penyediaan prasarana ketahanan pangan ;
2. Pengembangan pertanian yang produktif berwawasan lingkungan, efisien dan ekonomis yang diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya peran serta masyarakat tani, pelaku bisnis pertanian dan aparaturnya ;
3. Pembangunan pertanian yang berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi.
4. Pembangunan pertanian berdasarkan konsep tata ruang dan kawasan sentra komoditas pertanian.
5. Peningkatan perlindungan tanaman pertanian;
6. Peningkatan ketersediaan bibit tanaman bermutu;
7. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan usaha;
8. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan sistem budidaya semi intensif dan teknologi peternakan tepat guna;
9. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
10. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan kompetensi penyuluh dan pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha yang efektif dengan berorientasi pada hasil;

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Sekadau, persentase penduduk miskin trennya cenderung turun dari tahun 2016-2020 kecuali ditahun 2017 ada kenaikan dari tahun 2016. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sekadau tahun 2016 sebanyak 11.970 jiwa mengalami kenaikan menjadi 12.740 Jiwa (6,14% menjadi 6,46%), dan kembali menurun di tahun 2018 sebesar 0,3% (menjadi 12.293 jiwa) begitu juga tahun 2019 turun sebesar 0,05% (menjadi 12.280 jiwa), dan tahun 2020 berkurang sebesar 0,24% (11.920 jiwa).

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sekadau

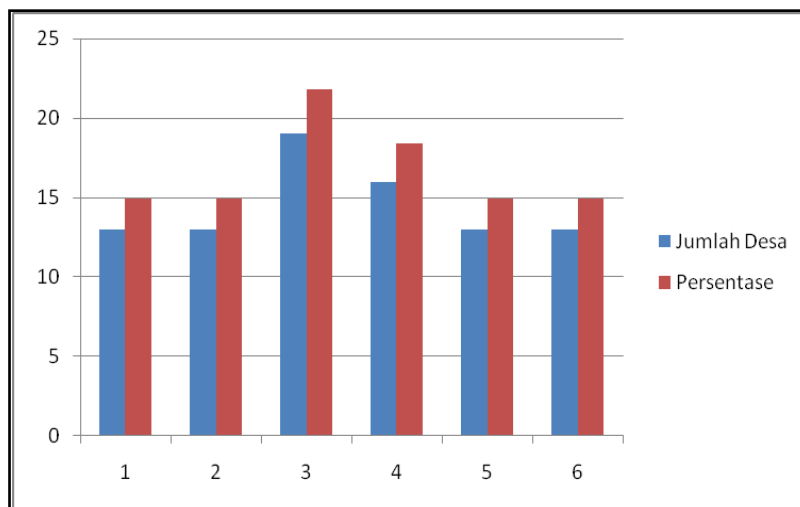
Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk miskin	6,14	6,46	6,16	6,11	5,87

Sumber: Kabupaten Sekada Dalam Angka 2021, BPS.

Pada tingkat desa berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau tahun 2020, sebanyak 13 Desa masuk kategori sangat rentan terhadap pangan (prioritas 1), 13 Desa masuk kategori rentan terhadap pangan (prioritas 2), 19 desa dengan kategori agak rentan (prioritas 3). Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 45 desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	13	14,9
2	Rentan	13	14,9
3	Agak Rentan	19	21,8
4	Agak Tahan	16	18,4
5	Tahan	13	14,9
6	Sangat Tahan	13	14,9



Gambar 3.1 Jumlah dan presentase desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Tabel 3.3 Sebaran desa di Kecamatan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	-	-	3	3
2	SEKADAU HULU	4	2	5	11
3	NANGA TAMAN	2	3	3	8
4	NANGA MAHAP	3	5	1	9
5	BELITANG HILIR	-	-	4	4
6	BELITANG	-	-	-	-
7	BELITANG HULU	3	3	3	9

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa dengan tingkat kesejahteraan terendah paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yaitu paling banyak di Kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 11 Desa, disusul Kecamatan Nanga Mahap, Belintang Hulu, Nanga Taman, Belintang Hilir dan terakhir Sekadau Hilir.

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) BPS tahun 2019, di Kabupaten Sekadau sebagian besar memiliki akses penghubung memadai, hanya sebagian

kecil yang belum. Adapun kriteria desa tanpa akses penghubung memadai yaitu : (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum. Adapun jumlah desa yang masuk dalam kategori rentan prioritas 1 dan 2 secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sebaran desa di Kecamatan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas		Total
		1	2	
1	SEKADAU HILIR	-	-	-
2	SEKADAU HULU	-	-	-
3	NANGA TAMAN	1 Desa	-	1 Desa
4	NANGA MAHAP	-	-	-
5	BELITANG HILIR	-	-	-
6	BELITANG	-	-	-
7	BELITANG HULU	-	1 Desa	1 Desa

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa memiliki akses penghubung memadai terdapat paling 1 Desa di Kecamatan Nanga Taman, dan 1 Desa di Kecamatan Belitang Hulu. Desa Lainnya tergolong dalam kategori prioritas 3 dan 4 yaitu tahan pangan.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Sekadau akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air diantaranya perahu motor dan kapal ferry contohnya untuk menuju Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu sebagian besar harus melewati sungai kapuas yang terletak di Kecamatan Belitang Hilir. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 diantaranya:

1. Meningkatkan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi.
2. Meningkatkan cakupan pembinaan dan penanganan anak terlantar
3. Meningkatkan Meningkatnya cakupan pembinaan dan penanganan penyandang cacat dan eks trauma
4. Meningkatkan cakupan penanganan gelandangan, Pengemis, PSK, dan Korban Penyalahgunaan Napza
5. Meningkatkan cakupan pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
6. Meningkatkan jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial
7. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan
8. Meningkatkan Jumlah Lahan Kesempatan Kerja

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengatasi hambatan akses penghubung seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 diantaranya:

1. Meningkatkan ruas/jaringan jalan dan jembatan yang baik
2. Meningkatkan fungsi saluran drainase/Gorong-gorong
3. Meningkatkan tebing sungai yang dapat diamankan
4. Meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan Talud/Bronjong
6. Meningkatkan upaya menghubungkan kembali akses barang/jasa yang terputus akibat bencana alam
7. Meningkatkan ketersediaan Informasi/Data Base Kondisi Jalan dan Jembatan
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di daerah
9. Meningkatkan pengembangan infrastruktur di Perdesaan
10. Meningkatkan normalisasi sungai

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini diketahui bahwa masih sebagian besar desa masih belum memiliki akses terhadap air bersih yang memadai yaitu sebesar 66% desa masuk dalam kategori rentan pangan (Prioritas 1-3).

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	29	33,3
2	Rentan	17	19,5
3	Agak Rentan	20	23
4	Agak Tahan	12	13,8
5	Tahan	6	6,9
6	Sangat Tahan	3	3,4

Tabel 4.2 Sebaran desa di Kecamatan dengan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	2	2	5	9
2	SEKADAU HULU	5	4	1	10
3	NANGA TAMAN	4	1	4	9
4	NANGA MAHAP	11	-	1	12
5	BELITANG HILIR	1	3	4	8
6	BELITANG	-	3	3	6
7	BELITANG HULU	6	4	2	12

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa tanpa akses air bersih yang memadai paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yaitu paling banyak di Kecamatan Nanga Mahap dan Belitang Hulu sebanyak 12 Desa, disusul Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Nanga Taman, Belitang Hilir dan terakhir Belitang.

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.3 Sebaran rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	9	10,3
2	Rentan	17	19,5
3	Agak Rentan	14	16,1
4	Agak Tahan	22	25,3
5	Tahan	10	11,5
6	Sangat Tahan	15	17,2

Tabel 4.2 Sebaran Desa di Kecamatan dengan jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	-	1	3	4
2	SEKADAU HULU	1	3	3	7
3	NANGA TAMAN	2	3	3	8
4	NANGA MAHAP	5	3	3	11
5	BELITANG HILIR	1	3	1	5
6	BELITANG	-	-	-	-
7	BELITANG HULU	-	4	1	5

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan yang paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Nanga Mahap 11 Desa, disusul Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan Belitang Hulu, dan terakhir Kecamatan Sekadau Hilir, sementara Kecamatan Belitang tidak terdapat Desa yang masuk dalam kondisi rentan pangan dalam hal jumlah tenaga kesehatan per Desa.

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

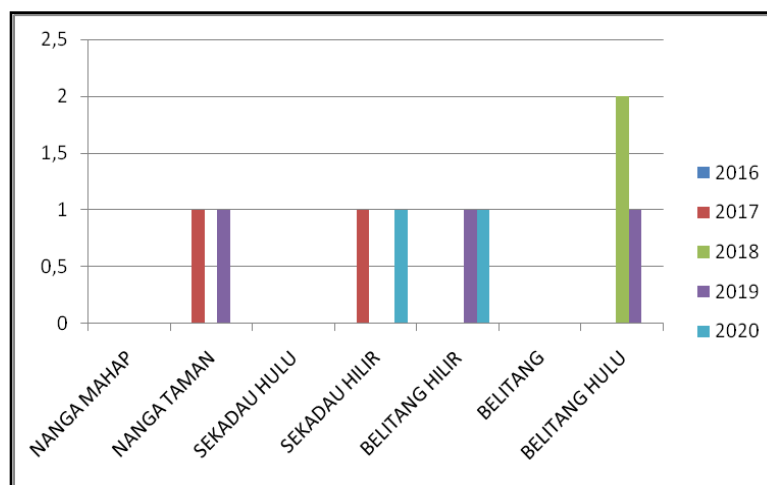
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Sekadau pada tahun 2016-2020 sebanyak 9 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Belitang Hulu (3 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Mahap dan belitang (0 balita) artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak ada kasus balita gizi buruk di 3 Kecamatan ini.

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk Periode 2016-2020

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nanga Mahap	-	-	-	-	-
2	Nanga Taman	-	1	-	1	-
3	Sekadau Hulu	-	-	-	-	-
4	Sekadau Hilir	-	1	-	-	1
5	Belitang Hilir	-	-	-	1	1
6	Belitang	-	-	-	-	-
7	Belitang Hulu	-	-	2	1	-
	Total	0	2	2	3	2

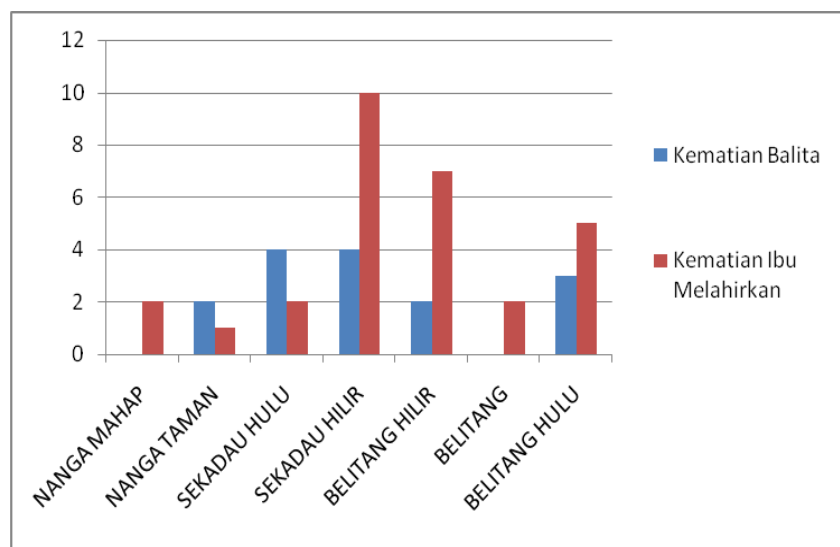


Gambar 4.1 Sebaran Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk Periode 2016-2020

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita pada tahun 2014-2020 di Kabupaten Sekadau adalah 15 jiwa, sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Sekadau 29 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu (masing-masing 4 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Nanga Mahap dan Belitang (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Sekadau Hilir (10 jiwa) dan terendah di Kecamatan Sekadau hulu dan Nanga Taman (1 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Periode 2014-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Nanga Mahap	0	2	2
2	Nanga Taman	2	1	3
3	Sekadau Hulu	4	2	6
4	Sekadau Hilir	4	10	14
6	Belitang Hilir	2	7	9
7	Belitang	0	2	2
8	Belitang Hulu	3	5	8
	Total	15	29	44



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Periode 2014-2020

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Sekadau, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah kesehatan secara umum yang tertuang dalam program prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau :

1. Meningkatkan Mutu dan ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Mengupayakan Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Obat dan Keamanan Makanan
4. Meningkatkan Pembinaan Pola Hidup Sehat, Pemanfaat Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan yang terlatih
5. Menurunkan Angka Kesakitan Bayi, Balita, dan Ibu
6. Meningkatkan Cakupan Rumah Sehat

7. Menurunkan Angka Kesakitan Menular dan Tidak Menular
8. Meningkatkan Kualitas/Mutu Pelayanan Kesehatan
9. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi penduduk Miskin
10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal dengan sarana kesehatan yang ada
12. Meningkatkan angka kematian dan kesakitan pada anak balita
13. Meningkatkan angka kematian ibu melahirkan dan neonates
14. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan
15. Meningkatkan Kesehatan bagi Remaja
16. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah sakit
17. Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Rumah sakit
18. Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

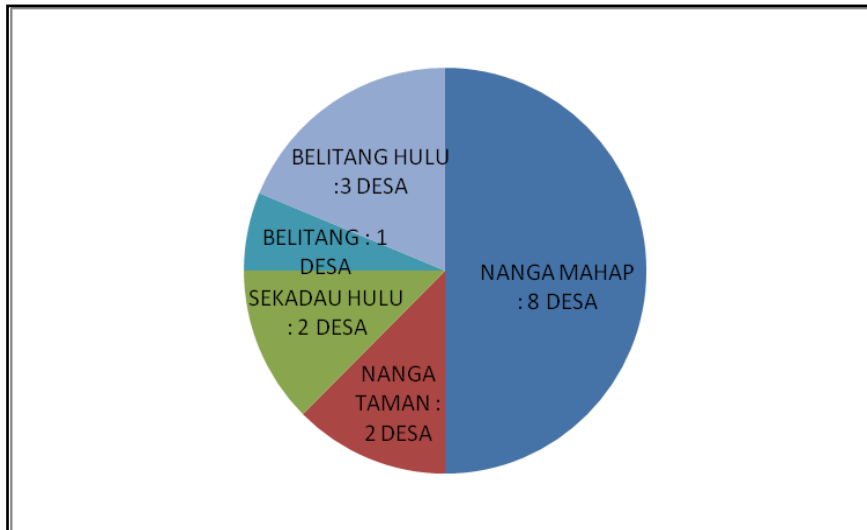
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 87 desa yang ada di Kabupaten Sekadau maka didapatkan 16 desa (Prioritas 2), 19 desa (Prioritas 3), 27 desa (Prioritas 4), 17 desa (Prioritas 5) dan 8 desa (Prioritas 6), dan tidak terdapat Desa yang masuk dalam prioritas 1 (sangat rentan). Secara Total 35 Desa Masuk dalam prioritas 1-3 (rentan).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

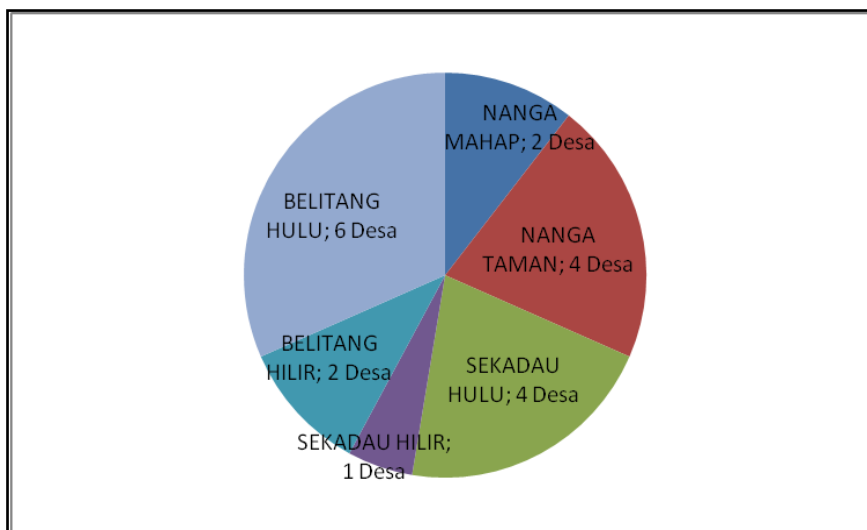
Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	-	-
2	16	18,39
3	19	21,84
4	27	31,03
5	17	19,54
6	8	9,2

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 (rentan) terdapat di wilayah Kecamatan Nanga Mahap (8 desa), Kecamatan Belintang Hulu (3 desa), Kecamatan Nanga Taman (2 desa), Kecamatan Sekadau Hulu (2 Desa) dan Kecamatan Belintang (1 Desa) dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Desa Prioitas 2 Per Kecamatan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 (cukup rentan) terdapat di wilayah Kecamatan Belintang Hulu (6 desa), Kecamatan Nanga Taman (4 desa), Kecamatan Sekadau Hulu (4 desa), Kecamatan Belintang Hilir (2 desa) dan Kecamatan Sekadau Hilir (1 Desa) dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Desa Priroitas 3 per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 dan 3 secara umum seperti pada data di atas disebabkan oleh faktor kerentanan pangan (bervariasi mulai dari sangat rentan, rentan dan agak rentan) yaitu : (1) rendahnya rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk (Ketersediaan Pangan), (2) rendahnya rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, (3) tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan Saran, (4) banyaknya jumlah Desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, (5) tingginya Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, dan (6) tingginya Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah penyebabnya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penanganan dan penyelesaiannya juga berbeda. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

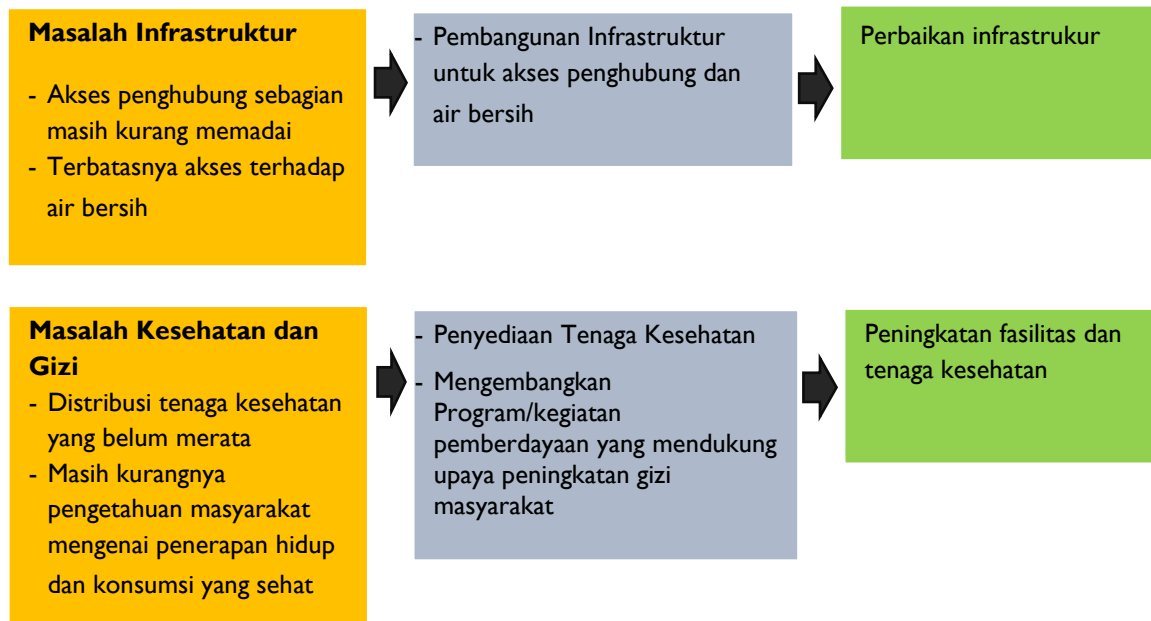
Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desanya prioritas 2-3 (rentan pangan) yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir, Belitang dan belitang Hulu.
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDM yang masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan





Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian potensial baru.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.